ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG

SKRIPSI

Diajukan Pada Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh

IKA NURHAYATI PUTRI

NIM: 141401510

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

2018 M/ 1440H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan diajukan pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 20 Juli 2018

Ika Nurhayati Putri
NIM: 141401510

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
Jl.Jendral Sudirman No.30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

ABSTRAK

Nama: **IKA NURHAYATI PUTRI**, NIM: 141401510, judul skripsi: **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang**

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih banyak, yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efesien dan efektif

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten serang tahun 2010-2016 berdasarkan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio keserasian (rasio belanja operasi dan rasio belanja modal) dan rasio efisiensi belanja ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganilisis kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten serang tahun 2010-2016 berdasarkan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio keserasian (rasio belanja operasi dan rasio belanja modal) dan rasio efisiensi belanja.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang ilmiah dan sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungannya. Analisis kuantitatif digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat pengukuran kuantitas (jumlah dan angka).

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa rata-rata derajat desentralisasi masuk katagori sangat rendah, rasio ketergantungan berada di tingkat katagori sedang, rasio kemandirian keuangan daerah, mengalami tingkat kemandirian yang sangat kurang, rasio keserasian yaitu rasio belanja operasi keuangan daerah, mengalami porsi belanja operasi yang cukup tinggi, rasio keserasian yaitu rasio belanja modal keuangan daerah, mengalami penurunan dan posri belanja modal yang cukup kecil, dan rasio efisiensi belanja kurang efisien

***Keyword**: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Keuangan Daerah*

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
Jl.Jendral Sudirman No.30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nomor : Nota Dinas
Lampiran: 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : **Pengajuan Ujian Skripsi**
a.n Ika Nurhayati Putri
NIM: 141401510

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam
Di- UIN SMH BANTEN
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudari Ika Nurhayati Putri, NIM: 141401510 yang berjudul **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang** telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 20 Juli 2018

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Budi Sudrajat, M.A.	**Dedi Sunardi, M.H.**
NIP. 19740307 200212 1 004	NIP. 19800926 200901 1 007

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG

Oleh:

IKA NURHAYATI PUTRI
NIM: 141401510

Menyetujui,

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Budi Sudrajat, M.A.	**Dedi Sunardi, M.H.**
NIP. 19740307 200212 1 004	NIP. 19800926 200901 1 007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,	Ketua Jurusan Ekonomi Syariah,
Dr. Hj. Nihayatul Masykuroh, M.Si.	**Hj. Mukhlisotul Jannah, S.E.,M.M., M.Ak.**
NIP. 19640212 199103 2 003	NIP. 19740822 200501 2 003

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Ika Nurhayati Putri, NIM: 141401510 yang berjudul **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 30 Oktober 2018.

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universita Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 09 November 2018

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,	Sekretaris Merangkap Anggota,
Dr. Hj. Nihayatul Masykuroh, M.Si.	**Ma'mun Nawawi, M.E.**
NIP. 19640212 199103 2 003	NIP.

Anggota-Anggota,

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Efi Syarifudin, S.Ag.,M.M.	**Hendrieta Ferieka, S.e.,M.Si.**
NIP. 19740307 200212 1 004	NIP. 19740307 200212 1 004
Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Budi Sudrajat, M.A.	**Dedi Sunardi, M.H.**
NIP. 19740307 200212 1 004	NIP. 19800926 200901 1 007

P E R S E M B A H A N

Tiada kata yang lebih indah selain memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selalu memberikan begitu banyak nikmat disetiap harinya

Solawat serta salam selalu terlimpah curahkan sebagai kerinduan kepada Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wassalam

Dengan tulus ikhlas
Ku persembahkan sebuah karya skripsi ini untuk:
Kedua orang tua yang selalu setia mendampingiku dan mengorbankan banyak hal untuk aku sampai kejenjang saat ini.

Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, keringat, dan air mata.
yang telah kalian curahkan dalam mendidik dan membesarkanku dengan ikhlas tanpa mengharap balas. Sehingga membuatku selalu kuat dalam menghadapi berbagai masalah.

MOTTO

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“ Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagimereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”

(Q.S. Al-Ahqaaf : 19)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Tiada kata yang paling indah selain mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Yang telah memberikan begitu banyak nikmat yakni nikmat iman dan islam. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada nabi dan rasul-Nya,yakni sayyidina Muhammad SAW. beserta para sahabatnya yang menolong agama-Nya dengan usaha yang sungguh-sungguh serta orang yang mengikuti ajarannya.

Berkat pertolongan Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Skripsi ini kemungkinan besar tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung dan belajar di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Ibu Dr. Hj. Nihayatul Masykuroh, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mendorong penyelesaian studi dan skripsi penulis.
3. Bapak Hadi Peristiwo, S.E.,M.M. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengarahkan, mendidik, serta memberikan motivasi kepada penulis.

4. Bapak Dr. Budi Sudrajat, M.A. selaku Pembimbing I yang dengan keikhlasannya memberikan pengarahan, ilmu yang berharga, serta bimbingan yang berarti selama proses penyelesaian skripsi. Terima kasih atas bimbingannya.
5. Bapak Dedi Sunardi, M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta bimbingan yang sangat berarti selama ini. Terima kasih atas semua bimbingan dan arahan yang telah bapak berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengajar dan mendidik serta memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh Staf Akademik, Pegawai Perpustakaan, dan Karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah banyak memberikan bantuannya kepada penulis selama masa studi.

8. Seluruh teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, motivasi, dukungan, serta bantuannya hingga terselesaikannya skripsi ini.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis berharap semoga Allah Subhanu Wa Ta'ala, membalasnya dengan pahala yang berlimpah. Aamiin.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun metodologi penulisannya. Untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaar bagi kita semua. Aamiin.

Serang, 20 Juli 2018
Penulis,

Ika Nurhayati Putri
NIM:1414015108

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI.....viii

DAFTAR TABEL.....xiv

DAFTAR GAMBAR xv

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang.....1
B. Identifikasi Masalah.....6
C. Batasan Masalah 7
D. Rumusan Masalah.....7
E. Tujuan Penelitian 8
F. Manfaat Penelitian.....9
G. Kerangka Pemikiran 10
H. Sistematika Pembahasan.....13

BAB II PEMBAHASAN 15

A. Kinerja Keuangan Daerah.....15
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah 15
2. Pengelolaan Keuangan Daerah 17
3. Kinerja Keuangan Daerah.....19

4. Perspektif Islam 32
B. Penelitian Terdahulu 34
C. Hipotesis Penelitian 46

BAB III METODE PENELITIAN 47

A. Tempat dan Waktu Penelitian 47
B. Jenis dan Sumber Data 48
D. Teknik Pengolahan Data 50
1. Rasio Derajat Desentralisasi 50
2. Rasio Ketergantungan 50
3. Rasio Kemandirian 51
4. Rasio Keserasian 51
5. Rasio Keserasian 51
J. Hipotesis 52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53

A. Gambaran Umum Kinerja Keuangan 53
B. Hasil Penelitian 56
C. Pembahasan Hasil Penelitian 75
D. Perspektif Islam 80
BAB V PENUTUP 83

A. KESIMPULAN 83
B. SARAN 85

DAFTAR PUSTAKA 87

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kategori Tingkat Desentralisasi Keuangan Daerah 26

Tabel 2.2 Kategori Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah . 27

Tabel 2.3 Kategori Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah..... 28

Tabel 2.4 Kategori Tingkat Efisiensiasi Keuangan Daerah 31

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu 35

Tabel 4.1 Rasio Derajat Desentralisasi 58

Tabel 4.2 Rasio Ketergantungan 61

Tabel 4.3 Rasio Kemandirian..... 64

Tabel 4.4 Rasio Belanja Operasi 67

Tabel 4.5 Rasio Belanja Modal 70

Tabel 4.6 Rasio Efisiensi Belanja 73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 12

Gambar 4.1 Rasio Derajat Desentralisasi..... 59

Gambar 4.2 Rasio Ketergantungan 62

Gambar 4.3 Rasio Kemandirian..... 65

Gambar 4.4 Rasio Belanja Operasi 68

Gambar 4.5 Rasio Belanja Modal 71

Gambar 4.6 Rasio Efisiensi Belanja..... 74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai suatu negara kesatuan, Indonesia menyelenggarakan sistem ekonomi daerah, dengan membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah, yang terdiri dari atas daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota. Daerah-daerah ini saling berhubungan erat dengan pemerintah pusat.[1]

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang kuat, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional.[2] Tujuan

---

[1] Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Silengkapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dengan Perubahan-Perubahannya* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 45.

[2] Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: ANDI, 2002), 8.

otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.[3]

Dalam rangka pelaksaaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang di ikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah timbul hak daerah yang dapat di nilai dengan uang sehingga perlu di kelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah dan di keluarkan peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.[4]

---

[3] HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 22

[4] Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba Edisi 3* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 119

Dari berbagai rumusan otonomi daerah dalam Undang-Undang yang pernah berlaku, otonomi daerah memiliki makna korelatif sebagai kewenangan dan kemandirian daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri untuk kepentingan masyarakat.[5]

Umumnya sumber keuangan daerah sebagian besar masih berupa bantuan dari pemerintahan pusat. Hanya sebagian kecil yang merupakan pendapatan asli daerah. ini jelas akan mengurangi sifat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. [6] Sebab anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, umumnya satu tahun.[7]

---

[5] Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 74.

[6] Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara Edisi Revisi* (Jakarta: RINEKA CIPTA, 1994), 222

[7] Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi* (Pejaten Barat: Ghalia Indonesia,2003), 122

Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan , karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Demikian juga semakin baik pengelolaannya maka semakin berdayaguna pemakaian uang tersebut.[8]

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih banyak, yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efesien dan efektif. [9] Kabupaten

---

[8] Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada),61

[9] Anis Karlina dan Nur Handayani, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015", 914.

Serang adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Banten yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensil. Pengembangan potensi wilayah kabupaten Serang tidak dapat dipisahkan sebagai bagian integral Provinsi Banten, sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya serta sosial ekonomi masyarakat menekankan pengembangan pembangunan pada pertanian, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa.

Sebab pemerintah daerah merupakan pihak yang menjalankan roda perekonomian, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dituntut untuk dapat melaksanakan pemerintahan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintahan yang bersih, maka pemerintah daerah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi yang berkala atas capaian pemerintah daerah dalam kurun

waktu tertentu, disini pemerintah daerah juga diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tertarik untuk mengambil judul "**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG "**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendapatan daerah belum sesuai dengan target yang direncanakan
2. Distribusi yang tidak lancar menyebabkan harga meningkat
3. Potensi-potensi daerah yang bisa menjadi sumber pendapatan daerah belum dikelola dengan baik

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas, agar lebih terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, dengan tujuan agar penelitian ini tidak menyimpang dari sasaran penulis akan meneliti sebatas pada kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Serang tahun 2010-2016 berdasarkan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio keserasian (rasio belanja operasi dan rasio belanja modal) dan rasio efisiensi belanja.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas , maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten serang tahun 2010-2016 berdasarkan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio keserasian (rasio belanja operasi dan rasio belanja modal) dan rasio efisiensi belanja.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah

Untuk mengetahui dan menganilisis kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten serang tahun 2010-2016 berdasarkan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio keserasian (rasio belanja operasi dan rasio belanja modal) dan rasio efisiensi belanja.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh sebelumnya di bangku perkuliahan, khususnya pada masa yang akan datang.

2. Bagi Universitas

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan, perbendaharaan bacaan ilmiah di perpustakaan dan menambah wawasan mahasiswa ekonomi pada penelitian selanjutnya.

3. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

4. Bagi peneliti yang akan datang

Sebagai bahan studi perbandingan atau informasi bagi peneliti selanjutnya dan para pembaca umumnya yang berhubungan dalam pembahasan pada bidang ini.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tujuan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternative solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat berupa bagan, deskriptif kuanitatif, atau bahkan gabungan keduanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efelktif, transparan, dan bertanggung

jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Keuangan daerah menurut peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 1 ayat 5 keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daeah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban darah tersebut, dalam rerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.[10]

[10] Abdul Halim, *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007), 24

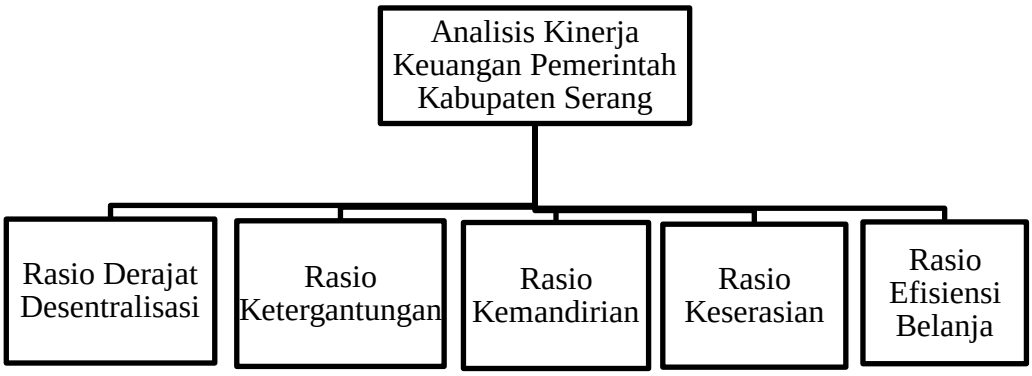

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, untuk melakukan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Serang terdapat lima indikator yaitu; rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio keserasian dan rasio efisiensi.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari:

BAB Ke-Satu Pendahuluan

Pada bab pertama yaitu pendahuluan, yang dijadikan acuan dalam proses awal penelitian, didalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi maslah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

BAB Ke-Dua Tinjauan Pustaka

Pada bab kedua menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu keuangan daerah, ruang lingkup keuangan daerah, kinerja keuangan daerah, penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian.

BAB Ke-Tiga Metodologi Penelitian

Pada bab ketiga menjelaskan tentang metodologi penelitian yang disadarkan dan dikembangkan berdasarkan pokok masalah utama guna mencapai hasil dan tujuan yang di inginkan. Pada bab ini menguraikan tentang tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, instrument penelitian, teknis analisis data.

BAB Ke-Empat Deskripsi Hasil Penelitian

Pada bab keempat menjelaskan tentang hasil analisis dari pengolahan data yang telah dilakukan meliputi Gambaran umum subjek penelitian, deskripsi subjek penelitian, hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian.

BAB Ke-Lima Penutup

Pada bab kelima ini berisi kesimpulan dari penelitian berdasarkan analisis data yang telah diolah dan telah dibahas pada bagian sebelumnya dan memberikan saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kinerja Keuangan Daerah

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.[1] Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan.[2]

---

[1] Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 347

[2] Abdul Halim dan Muhamad Iqbal, *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), 24.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah, didukung dana dari dan atau beban anggran pendapatan dan belanja negara. Di bidang penyelenggaraan keuangan daerah, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. dalam melaksakan kekuasaan tersebut, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kakuasaannya berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. pelimpahan sebagaian atau seluruh kekuasaan ini didasarkan atas prinsip pemisahan kewenangan anatara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.[3]

---

[3] Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 78.

Jadi keuangan daerah merupakan hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dan sumber-sumber pendapatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kewajiban daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan sehingga dapat meningkatkan kekayan daerah tersebut.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah dikelola menggunakan manajemen keuangan daerah dengan suatu alat untuk melaksanakannya yang disebut tata usaha daerah. tata usaha daerah dibagi menjadi dua jenis yakni tatusaha umum dan tata usaha keuangan. Tatusaha umum terkait dengan urusan surat menyurat dan adminitrasi lainnya, sedangkan tata usaha keuangan daerah terkait dengan tata

buku yang merupakan rangkaian kegiatan sitematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, dan prosedur tertentu sehingga menghasilkan informasi aktual dibidang keuangan. Saat ini tatusaha keuangan atau tata buku lebih popular dengan istilah akuntansi keuangan daerah atau lebih tepatnya merupoakan salah satu bagian dalam akuntansi keunagan daerah.[4]

Pengelolaan keuangan daerah mengikuti ketentuan undang-undang di bidang keuangan negara. Siklus pengelolaan ini tidak terlepas pada siklus manajemen yang terkenal selama ini. Perencanaan merupakan awal dari siklus yang diikuti dengan pelakasanaan dan pengawasan.[5]

---

[4] Pramono Hariadi, dkk, *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 3-5.

[5] Mursyidi, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 12.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan ruang lingkup keuangan daerah yang dikelola langsung. Baik anggaran pendapatan dan belanja negara maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan inti keuangan pemerintahan, terutama dalam era prareformasi keuangan negara/daerah karena selama era tersebut anggaran merupakan satu satunya informasi keuangan yang dihasilkan pemerintah.

Oleh karena itu, kedudukan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam pengelolaan pemerintah sangat penting, terlebih pada era reformasi keuanagan negara dan daerah.

3. Kinerja Keuangan Daerah

Pengertian kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merupakan kata benda yang artinya: (1) Sesuatu yang dicapai, (2) Prestasi yang diperlihatkan, (3) Kemampuan kerja. Kinerja juga dapat diatikan sebagai

keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Selain itu kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.[4]

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap Angaaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.[5]

---

[4] Asmaul Azis, "Pengaruh Karakteristik Pemerintah daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah," dalam Jurnal EKSIS, Vol. XI, No. 1, (April, 2016), 90.

[5] Armaja, dkk, "P

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa kinerja adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Ukuran kinerja menjadi dua, yaitu ukuran kinerja keuangan dan ukuran kinerja non-keuangan. Kinerja keuangan biasanya diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat, yaitu dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Di pihak lain, kinerja non-keuangan dapat dilihat dari kualitas pelayanan, kedisiplinan, kepuasan pelanggan dan sebagainya.[6]

---

engaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan," dalam *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 3, No. 2 (September, 2015), 171.

[6] Armaja, dkk, "Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan," dalam *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 3, No. 2 (September, 2015), 170.

Dalam jurnal Dewi SPA dan Fajar Harimurti, kinerja keuangan daerah memiliki peran dalam mengelola asset, dalam hal ini termasuk keuangan daerah, sehingga masing-masing daerah perlu mengelola keuangan yang dimilikinya. Untuk dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*) maka sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk dapat mewujudkannya. Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan.[7]

[7] Dewi SPA dan Fajar Harimurti, "Pengaruh Pengawasan Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar" dalam jurnal *Eksplorasi*, Volume XXIX, No.2 (Februari-2017), 166.

Kinerja Keuangan Daerah adalah wujud dari bentuk penilaian terhadap pencapaian kegiatan atau serangkaian program suatu organisasi dalam satu periode tertentu di bidang keuangan dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan, yang nantinya akan dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target dan sasaran yang sebelumnya telah disepakati bersama.[8]

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukan bagaimana uang publik dibelanjakan akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan outpun yang maksimal, efektif berarti

[8] Susilowati, dkk, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2013-2015, " *dalam Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, Vol. 12, No. 2 (Juni, 2016), 232

penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas.

Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dan anggarannya. Apabila realisasi melampaui anggaran (target) maka kinerja dapat dinilai dengan baik. Penilaian kinerja pendapatan pada dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah telah melampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut kompenen pendapatan apa yang paling berpengaruh.[9]

---

[9] Karlina Anis dan Handayani Nur, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015" *dalam Jurnal: Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol. 6, No. 3 (Maret, 2017), 916.

Dalam laporan keuangan rasio adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lainnya dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio. Rasio ini dapat memberikan gambaran tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan.[10] Untuk mengukur kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan:[11]

a. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Berikut adalah tabel kategori tingkat desentralisasi keuangan daerah:

---

[10] Anis Karlina dan Nur Handayani, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015", 917.

[11] Marina F. Pandjaitan, dkk, "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2011-2016", *Jurnal Emba*, Vol. Vol.6 No.3 (Juli 2018),1399

Tabel 2.1

Kategori Tingkat Desentralisasi Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan	Desentralisasi keuangan
Sangat rendah	0%-25%
Rendah	> 25%-50%
Sedang	> 50%-75%
Tinggi (mandiri)	> 75%-100%

b. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan keuangan daerah yaitu rasio yang mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi.

Tabel 2.2

Kategori Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan	Ketergantungan
Sangat rendah	0%-25%
Rendah	> 25%-50%
Sedang	> 50%-75%
Tinggi (ketergantungan)	> 75%-100%

c. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian adalah tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Tabel 2. 3.

Kategori Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat rendah	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Keterangan pola hubungan rasio kemandirian:

1) Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

d. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

e. Rasio Efisiensi Belanja

Kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

Tabel 2.4.

Kategori Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Kriteria Efisiensi	Efisiensi (%)
Tidak efisien	> 100%
Kurang efisien	90% - 100%
Cukup efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat efisien	< 60%

Jadi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

4. Perspektif Islam

Keuangan menurut perspektif Islam adalah bentuk keuangan yang di dasarkan pada syariah atau bangunan hukum Islam. Karena itu, syariah lebih dari sekadar perangkat auran-aturan hukum. Sejatinya syariah mewakili gagasan bahwa semua manusia dan pemerintah tunduk pada keadilan dibawah hukum. Untuk menjamin kepatuhan terhadap syariah ada lima prinsip utama yang harus di ikuti secara ketat yaitu, keyakinan pada tuntutan Ilahi, tidak adanya bunga, tidak ada investasi haram, berbagi risiko diajukan, pembiayaan didasarkan pada aset riil.[12]

Dalam rangka menjelaskan tentang konsep Islam tentang harta ada baiknya dilihat dan direnungkan kembali Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi :

[12] Daud Vicary Abdulah dan Keon Chee, *Buku Pintar Keuangan Syariah* (Jakarta: Zaman, 2012), 20.

.....ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ مَمْتُوَأَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ

ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة : ٣)

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Maidah : 3).[13]

Firman yang ada ini merupakan penegasan dari Allah bahwa Islam memiliki sistem yang sempurna dalam rangka membahas berbagai persoalan yang ada di dunia baik yang bersifat materi atau bukan. Termasuk dalam hal ini adalah dalam aspek ekonomi. Dan dalam usaha untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tersebut Allah selaku Sang Maha Pencipta

---

[13] Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Antapani, 2007)

menyediakan berbagai sumber daya yang melimpah bagi umat manusia.[14]

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai alat bantu dalam memberikan gambaran terkait penelitian yang akan dilakukan. Bantuan yang bisa di dapat ialah berupa gambaran tentang bagaimana menyusun kerangka berpikir, bagaimana mengelola data dan memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui hasil yang telah dijabarkan dalam penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu juga digunakan untuk mengetahui apakah terdapat persamaan atau perbedaan antara penelitian yang telah di lakukan sebelumnya. Berikut hasil *review* terhadap penelitian terdahulu:

[14] Nurul Huda dan Muhamad Heykal, *Lembaga KEuangan Syariah Tinjauan Teoritis Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 8.

Tabel 2.5

Penelitian Terdahulu

No	Nama, Fakultas, Universitas, Judul, Tahun	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Anis karlina dan Nurhandayani, Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, *Analisis Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015*	Persamaan: Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Kinerja Keuangan Daerah Perbedaan: Periode dalam penelitian ini hanya tiga tahun, pemerintah daerah kabupaten Minahasa	Hasil analisis menunjukkan bahwa 1) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Surabaya secara umum dikatakan Kurang baik dalam varians pendapatan. Hal ini dibuktikan

			(a) varians pendapatan daerah rata-rata di bawah 100%, (b) rasio keuangan daerah dilihat derajat desentralisasi menunjukkan ratarata 53,54%, rasio kemanirian keuangan daerah rata-rata 176,05%, rasio pertumbuhan pendapatan daerah rata-rata positif, 2) kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan

			angaran belanja daerah Kota Surabaya secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan (a) varians belanja daerah rata-rata di bawah 100%, (b) keserasian belanja daerah dilihat dari rata-rata belanja modal 24,98% dan rata-rata belanja operasional 74,98%, (c) efesiensi belanja daerah rata-rata dibawah 100% yakni 82,54%,

			(b) pertumbuhan belanja daerah mengalami pertumbuhan rata-rata 11,00%, (c) keserasian belanja daerah dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi rata-rata 90,33% dibandingkan dengan belanja modal ratarata

			9,57%, (d) efisiensi belanja daerah menunjukkan rata-rata di bawah 100%.
2	Aldy H. R. Pangkey, dkk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen, Universitas Sam Ratulangi Manado, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2015*, 2017	Persamaan: Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Kinerja Keuangan Daerah, Perbedaan: Periode dalam penelitian ini hanya lima tahun, pemerintah daerah kabupaten Minahasa	Hasil Rasio Kemandirian Pendapatan Asli Daerah menunjukan tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Rasio tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal pemerintah daerah masih rendah namun dilihat dari Rasio Efektifitas

			Pendapatan Asli Daerah tingkat Efektifitas pengelolaan keuangan daerah terbilang sangat efektif dan dari rasio keserasian belanja daerah menunjukan keseimbangan antar belanja masih belum seimbang. Penyebabnya adalah potensi yang dimiliki masih kurang dikelolah oleh pemerintah. Jika potensi-potensi berhasil di maksimalkan,

			maka pajak yang merupakan penopang utama Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat, dan akan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyatrakat, agar masyarakat dapat menikmati setiap pembangunan fisik yang disediakan pemerintah daerah.
3	Susilowati, dkk, Program Studi	Persamaan: Dalam	Kesimpulannya: 1) Hasil analisis

	Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2013 – 2015, 2016	penelitian ini variabel yang digunakan adalah Kinerja Keuangan Daerah, Perbedaan: Periode dalam penelitian ini hanya tiga tahun, pemerintah daerah kabupaten Karanganyar	rasio tingkat desentralisasi fiskal Karanganyar tahun 2013 hingga 2015 menunjukkan pada tahun 2013. Rasio Tingkat Desentralisasi Fiskal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar sebesar 9,81%. Pada tahun 2014 menurun menjadi 9,76%, tahun berikutnya meningkat menjadi 11,21% terjadi pada

			kategori kurang. 2) Hasil analisis rasio ketergantungan Karanganyar tahun 2013-2015 menunjukkan ketergantungan keuangan relatif rendah. 3) Hasil analisis rasio kemandirian keuangan lokal tahun 2013-2015 menunjukkan kemampuan keuangan Karanganyar Karanganyar masih relatif sangat rendah dan pola hubungan

			termasuk pola hubungan instruktif dimana peran pemerintah pusat lebih dominan daripada independensi pemerintah daerah. (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah), 4) Hasil analisis rasio efektivitas PAD Karanganyar tahun 2013 hingga 2015 menunjukkan bahwa efektifitas

			Keuangan Pemerintah Daerah Karanganyar pada tahun 2013 dan 2014 cukup efektif, dan 2015 adalah sangat efektif. 5) Hasil analisis rasio efisiensi belanja daerah Rasio Efisiensi Belanja Daerah Karanganyar tahun 2013-2015 sangat efisien untuk interval efisiensi kurang dari 10%.

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya. Hipotesis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah:

H_0 : Diduga kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Serang tahun 2010-2016 tidak berjalan dengan baik berdasarkan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio keserasian (rasio belanja operasi dan rasio belanja modal) dan rasio efisiensi belanja.

H_a : Diduga kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Serang tahun 2010-2016 berjalan dengan baik berdasarkan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio keserasian (rasio belanja operasi dan rasio belanja modal) dan rasio efisiensi belanja.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakuakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang yang beralamatkan di Jl. Tb. Bakri No. 138, Kota Baru, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42112, Indonesia. Telp. (0254) 200983, Email. bpkadkabserang@gmail.com.

Penelitian ini dilakukan pada Oktober sampai November 2017 dengan tahun pengamatan dari 2010 sampai dengan 2016 untuk memperoleh data-data yang menunjukan gambaran tentang analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Serang.

B. Jenis dan Sumber Data

Data adalah segala bahan keterangan atau fakta yang sudah dicatat dan dapat diobservasi. Misalnya dokumen daftar karyawan satu kantor, sebagai bahan informasi atau penelitian.[1] Dengan kata lain data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta atau juga dapat didefinisikan data merupakan kumpulan fakta atau segala sesuatu yang dapat sebagai pengumpul data apabila informan yang dikumpulkan bersumber dari dokumen, seperti: buku, jurnal, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.[2]

---

[1] Abdul Halim Hanafi, *Metode Penelitian Bahasa Untuk Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Diadit Media, 2011), 123.

[2] Etta Mamang Sangadji, dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2010) 47-48.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara mencatat atau mendokumentasikan data yang berkaitan dengan penelitian yang di lakukan yaitu berkaitan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Serang.

Melakukan penelitian berarti mencoba mencari solusi atas suatu permasalahan dengan cara-cara ilmiah, salah satunya dengan melakukan studi pustaka. Tempat yang paling tepat untuk melakukan studi pustaka tentu saja perpustakaan yang menyediakan berbagai buku dan tulisan secara gratis, seperti perpustakaan kampus, perpustakaan daerah, perpustakaan nasional dan lain sebagainya. Namun di zaman yang canggih dengan teknologi sekarang ini, kita juga dapat dengan mudah mengakses buku-buku, tulisan dan jurnal ilmiah secara online sehingga semakin banyak sumber-sumber yang dapat diakses.

D. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data menggunakan metode analisis data, untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Serang tahun 2010 sampai 2016, maka dilakukan pengujian berdasarkan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio keserasian (rasio belanja operasi dan rasio belanja modal) dan rasio efisiensi belanja untuk mengukur tingkat kinerja keuangan, adapun rumusnya sebagai berikut:

1. Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

2. Rasio Ketergantungan

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

3. Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi +Pinjaman}} \times 100\%$$

4. Rasio Keserasian

$$\text{a.Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{b. Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

5. Rasio Keserasian

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

J. Hipotesis

Peneliti memberikan hipotesis sementara yaitu: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang berjalan dengan baik berdasarkan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio keserasian (rasio belanja operasi dan rasio belanja modal) dan rasio efisiensi belanja.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kinerja Keuangan

Kinerja dan kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja lembaga.[29]

[29] Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah Edisi Pertama* (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2011) 91.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah menyangkut tiga bidang analisis yang saling terikat satu sama lain. Ketiga aspek tersebut meliputi:[30]

1. Analisis Penerimaan

   Merupakan analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut. Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktorfaktor produksi dan keadilan. Analisis sisi pendapatan menggunakan pendapatan asli daerah sebagai titik sentral analisisnya.

---

[30]Abdul Halim, *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah Edisi Pertama* (UPP AMP YKPN : Yogyakarta, 2001) , 120.

2. Analisis Pengeluaran

Merupakan analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya tersebut meningkat. Dilihat dari sisi pengeluaran, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu membelanjakan pendapatan yang diterima untuk selanjutnya memberikan timbal balik atas pengeluaran tersebut. Timbal balik dalam hal ini seperti pendapatan pajak dan retribusi. Analisis sisi pengeluaran menekankan pada belanja daerah sebagai titik setral analisisnya.

3. Analisis Anggaran

Merupakan analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Hasil analisis pendapatan dan pengeluaran merupakan komponen dalam menganalisis keuangan daerah. Jika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, akan terjadi surplus anggaran dan jika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan akan terjadi defisit anggaran. Dalam hal ini perlu diperhatikan bagaimana kondisi keuangan yang ada pada tahun sekarang dan kecendurangannya pada tahun-tahun mendatang, sehingga pola surplus dan defisit anggaran dapat diprediksikan.

B. Hasil Penelitian

Kinerja keuangan daerah menggunakan beberapa rasio kinerja keuangan daerah yang antara lain: rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio keserasian dan rasio efisiensi belanja. untuk mengukur kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Serang tahun 2010-2016 sebagai berikut :

Tahun 2010 = $\frac{134,718,556,929.00}{945,291,176,583.00}$ x 100% = 14.25%

Tahun 2011 = $\frac{26,063,614,101.00}{1,322,429,273,871.00}$ x 100% = 1.97%

Tahun 2012 = $\frac{51,067,699,667.00}{1,488,016,015,274.00}$ x 100% = 3.43%

Tahun 2013 = $\frac{66,892,896,367.00}{1,766,523,728,157.00}$ x 100% = 3.79%

Tahun 2014 = $\frac{88,403,745,237.00}{2,012,068,317,407.00}$ x100% = 4.39%

Tahun 2015 = $\frac{76,261,835,849.00}{2,304,837,741,509.00}$ x 100% = 3.31%

Tahun 2016 = $\frac{590,865,666,125.00}{2,468,077,495,354.00}$ x 100% = 23.94%

Tabel 4. 1.

Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Serang Tahun 2010-2016

Tahun	Pad (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi %
2010	134,718,556,929.00	945,291,176,583.00	14.25%
2011	26,063,614,101.00	1,322,429,273,871.00	1.97%
2012	51,067,699,667.00	1,488,016,015,274.00	3.43%
2013	66,892,896,367.00	1,766,523,728,157.00	3.79%
2014	88,403,745,237.00	2,012,068,317,407.00	4.39%
2015	76,261,835,849.00	2,304,837,741,509.00	3.31%
2016	590,865,666,125.00	2,468,077,495,354.00	23.94%
Rata-rata	147,753,430,610.71	1,758,177,678,307.86	7.87 %

Sumber: Hasil Olahan Data

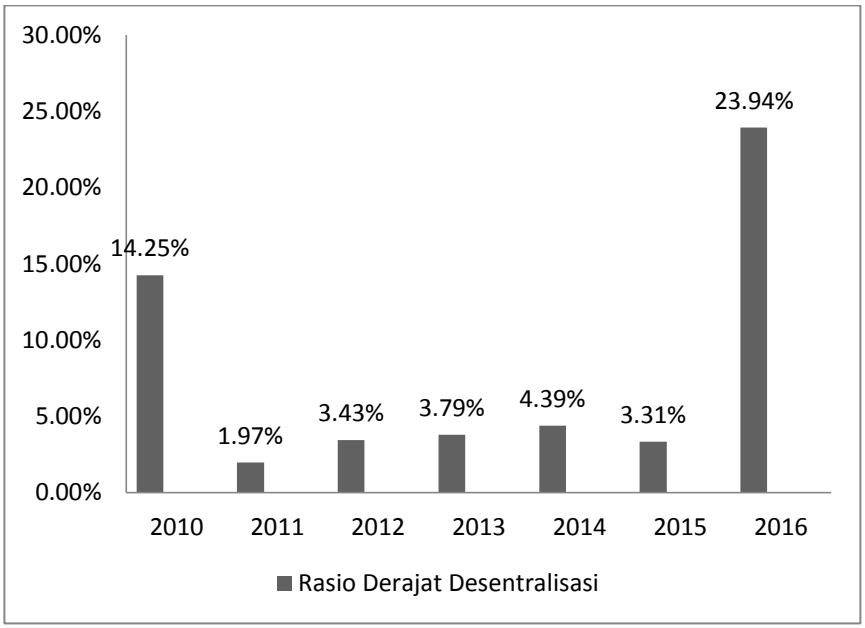

Gambar Grafik 4.1

Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Serang

Tahun 2010-2016

Persentase tingkat derajat desentraliasi terkecil terdapat pada tahun 2011 yaitu 1.97 % sedangkan persentase tingkat derajat desentralisasi terbesar terdapat pada tahun 2016 yaitu 23.94 %. Apabila dilihat dari tahun 2010-2016, rata-rata derajat desentralisasi yaitu 7.87 %. Derajat desentralisasi keuangan pemerintah kabupaten Serang masuk dalam kategori sangat rendah**.**

2. Rasio Ketergantungan Kabupaten Serang tahun 2010-2016 sebagai berikut:

Tahun 2010 = $\frac{749,912,484,894.00}{945,291,176,583.00}$ x 100% = 79.33%

Tahun 2011 = $\frac{773,980,562,441.00}{1,322,429,273,871.00}$ x 100% = 58.53%

Tahun 2012 = $\frac{945,460,262,186.00}{1,488,016,015,274.00}$ x 100% = 63.54%

Tahun 2013 = $\frac{1,036,911,054,204.00}{1,766,523,728,157.00}$ x 100% = 58.70%

Tahun 2014 = $\frac{1,108,843,868,654.00}{2,012,068,317,407.00}$ x100% = 55.11%

Tahun 2015 = $\frac{1,114,480,170,958.00}{2,304,837,741,509.00}$ x 100% = 48.35%

Tahun 2016 = $\frac{1,419,534,466,039.00}{2,468,077,495,354.00}$ x 100% = 57.52%

Tabel 4. 2.

Rasio Ketergantungan Kabupaten Serang Tahun 2010-2016

Tahun	Pendapatan Trasfer (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Rasio Ketergantungan
2010	749,912,484,894.00	945,291,176,583.00	79.33%
2011	773,980,562,441.00	1,322,429,273,871.00	58.53%
2012	945,460,262,186.00	1,488,016,015,274.00	63.54%
2013	1,036,911,054,204.00	1,766,523,728,157.00	58.70%
2014	1,108,843,868,654.00	2,012,068,317,407.00	55.11%
2015	1,114,480,170,958.00	2,304,837,741,509.00	48.35%
2016	1,419,534,466,039.00	2,468,077,495,354.00	57.52%
Rata-Rata	1,021,303,267,053.71	1,758,177,678,307.86	60.15 %

Sumber: Hasil Olahan Data

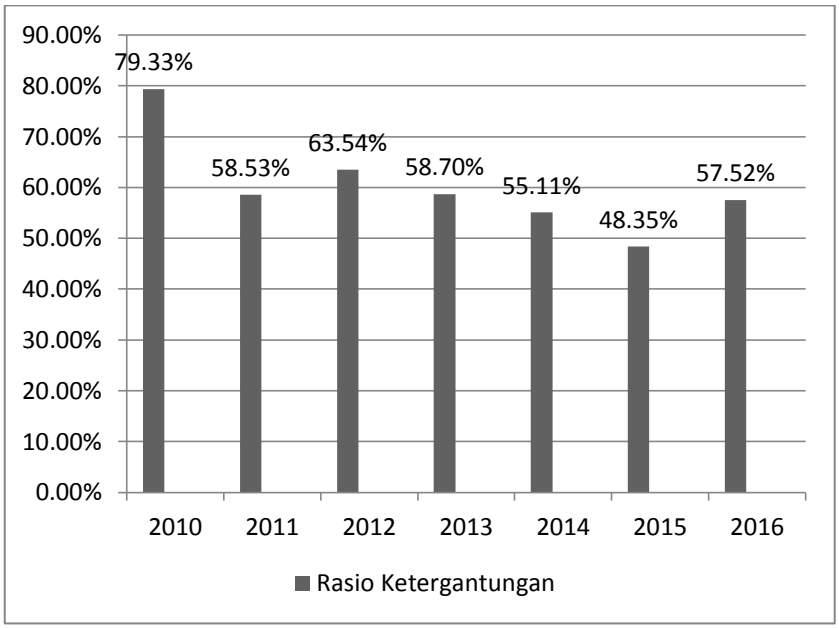

Gambar Grafik 4.2

Rasio Ketergantungan Kabupaten Serang Tahun 2010-2016

Persentase tingkat rasio ketergantungan terkecil terdapat pada tahun 2015 yaitu 48.35 % sedangkan persentase tingkat rasio ketergantungan terbesar terdapat pada tahun 2010 yaitu 79.33 %. Apabila dilihat dari tahun 2011-2016, rata-rata rasio ketergantungan yaitu 60.15 %. Rasio ketergantungan keuangan pemerintah kabupaten Serang masuk dalam kategori sedang.

3. Rasio Kemandirian Kabupaten Serang tahun 2010-2016 sebagai berikut:

Tahun 2010 = $\frac{134,718,556,929.00}{749,912,484,894.00}$ x 100% = 17.96%

Tahun 2011 = $\frac{26,063,614,101.00}{773,980,562,441.00}$ x 100% = 3.37%

Tahun 2012 = $\frac{51,067,699,667.00}{945,460,262,186.00}$ x 100% = 5.40%

Tahun 2013 = $\frac{66,892,896,367.00}{1,036,911,054,204.00}$ x 100% = 6.45%

Tahun 2014 = $\frac{88,403,745,237.00}{1,108,843,868,654.00}$ x100%=7.97%

Tahun 2015 = $\frac{76,261,835,849.00}{1,114,480,170,958.00}$ x 100% = 6.84%

Tahun 2016 = $\frac{590,865,666,125.00}{1,419,534,466,039.00}$ x 100% = 41.62%

Tabel 4. 3.

Rasio Kemandirian Kabupaten Serang Tahun 2010-2016

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian
2010	134,718,556,929.00	749,912,484,894.00	17.96%
2011	26,063,614,101.00	773,980,562,441.00	3.37%
2012	51,067,699,667.00	945,460,262,186.00	5.40%
2013	66,892,896,367.00	1,036,911,054,204.00	6.45%
2014	88,403,745,237.00	1,108,843,868,654.00	7.97%
2015	76,261,835,849.00	1,114,480,170,958.00	6.84%
2016	590,865,666,125.00	1,419,534,466,039.00	41.62%
Rata-Rata	147,753,430,610.71	1,021,303,267,053.71	13%

Sumber: Hasil Olahan Data

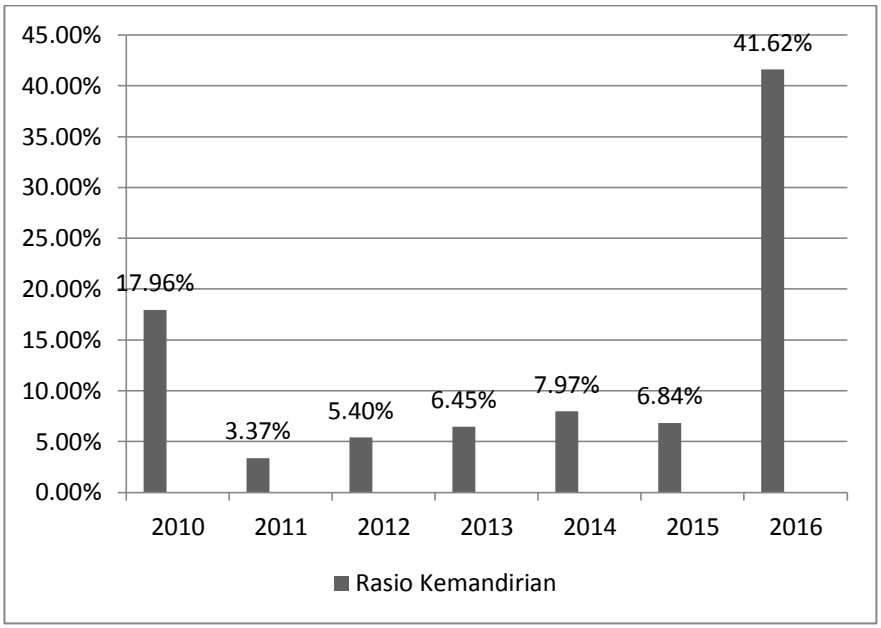

Gambar Grafik 4.3

Rasio Kemandirian Kabupaten Serang Tahun 2010-2016

Persentase tingkat rasio kemandirian terkecil terdapat pada tahun 2011 yaitu 33.7 % sedangkan persentase tingkat rasio kemandirian terbesar terdapat pada tahun 2016 yaitu 41,62 %. Apabila dilihat dari tahun 2010-2016, rata-rata rasio kemandirian yaitu 13,00 % dengan pola hubungan yaitu pola instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan jauh dibandingkan pemerintah daerah itu sendiri.

4. Rasio Keserasian Kabupaten Serang tahun 2010-2016 sebagai berikut:

a. Rasio Belanja Operasi

Tahun 2010 = $\frac{654,955,280,796.00}{991,762,757,790.00}$ x 100% = 17.96%

Tahun 2011 = $\frac{691,117,195,856.00}{1,173,739,190,170.00}$ x 100% = 3.37%

Tahun 2012 = $\frac{806,290,574,627.00}{1,413,896,049,316.00}$ x 100% = 5.40%

Tahun 2013 = $\frac{902,605,812,012.00}{1,706,378,016,007.00}$ x 100% = 6.45%

Tahun 2014 = $\frac{985,254,470,858.00}{1,909,367,171,714.00}$ x100%= 7.97%

Tahun 2015 = $\frac{1,327,565,667,868.00}{2,342,220,890,626.00}$ x 100% = 6.84%

Tahun 2016 = $\frac{1,399,140,530,705.00}{2,543,616,888,641.00}$ x 100% = 41.62%

Tabel 4. 4.

Rasio Belanja Operasi Kabupaten Serang Tahun 2010-2016

Tahun	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja (%)
2010	654,955,280,796.00	991,762,757,790.00	66.04%
2011	691,117,195,856.00	1,173,739,190,170.00	58.88%
2012	806,290,574,627.00	1,413,896,049,316.00	57.03%
2013	902,605,812,012.00	1,706,378,016,007.00	52.90%
2014	985,254,470,858.00	1,909,367,171,714.00	51.60%
2015	1,327,565,667,868.00	2,342,220,890,626.00	56.68%
2016	1,399,140,530,705.00	2,543,616,888,641.00	55.01%
Rata-Rata	966,704,218,960.29	1,725,854,423,466.29	56.88%

Sumber: Hasil Olahan Data

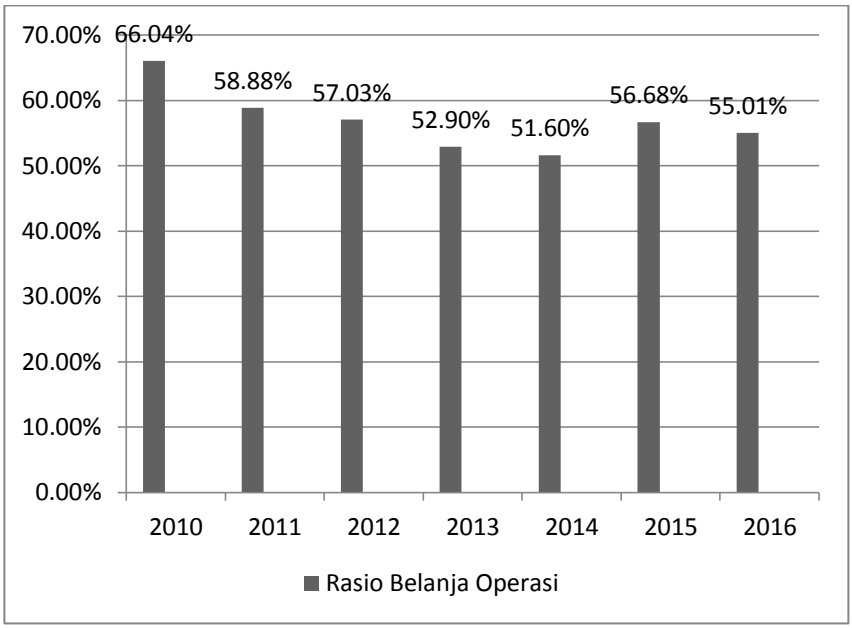

Gambar Grafik 4.4

Belanja Operasi terhadap total belanja Kabupaten Serang

Tahun 2010-2016

Persentase tingkat rasio belanja operasi terhadap total belanja terkecil terdapat pada tahun 2014 yaitu 51.60 % sedangkan persentase tingkat rasio belanja operasi terhadap total belanja terbesar terdapat pada tahun 2010 yaitu 66.04 %. Apabila dilihat dari tahun 2010-2016, dengan rata-rata rasio belanja operasi terhadap total belanja yaitu 56.88 %.

b. Rasio Belanja Modal

Tahun 2010 = $\frac{336,807,476,994.00}{991,762,757,790.00}$ x 100% = 33.96%

Tahun 2011 = $\frac{482,621,994,314.00}{1,173,739,190,170.00}$ x 100% = 41.12%

Tahun 2012 = $\frac{607,605,474,689.00}{1,413,896,049,316.00}$ x 100% = 42.97%

Tahun 2013 = $\frac{803,772,203,995.00}{1,706,378,016,007.00}$ x 100% = 47.10%

Tahun 2014 = $\frac{924,112,700,856.00}{1,909,367,171,714.00}$ x100%=48.40%

Tahun 2015 = $\frac{1,014,655,222,758.00}{2,342,220,890,626.00}$ x 100% = 43.32%

Tahun 2016 = $\frac{1,144,476,357,936.00}{2,543,616,888,641.00}$ x 100% = 81.80%

Tabel 4. 5.

Rasio Belanja Modal Kabupaten Serang Tahun 2010-2016

Tahun	total belanja modal (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja (%)
2010	336,807,476,994.00	991,762,757,790.00	33.96%
2011	482,621,994,314.00	1,173,739,190,170.00	41.12%
2012	607,605,474,689.00	1,413,896,049,316.00	42.97%
2013	803,772,203,995.00	1,706,378,016,007.00	47.10%
2014	924,112,700,856.00	1,909,367,171,714.00	48.40%
2015	1,014,655,222,758.00	2,342,220,890,626.00	43.32%
2016	1,144,476,357,936.00	1,399,140,530,705.00	81.80%
Rata-Rata	759,150,204,506.00	1,562,357,800,904.00	48.38%

Sumber: Hasil Olahan Data

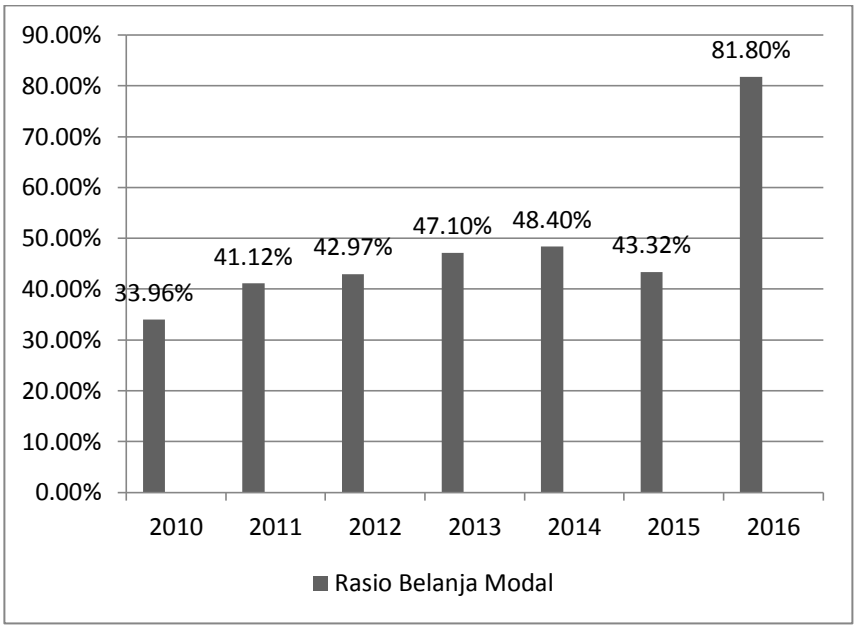

Gambar Grafik 4.5

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Kabupaten Serang Tahun 2010-2016

Persentase tingkat rasio belanja modal terhadap total belanja terkecil terdapat pada tahun 2010 yaitu 33,96 %,. Rasio ini mengalami peningkatan dari tahun 2011-2014 dan kembali menurun di tahun 2015 namun kembali meningkat di tahun 2016 dengan persentase tingkat rasio belanja modal terhadap total belanja yaitu 81,80 %. Apabila dilihat dari tahun 2010-2016, dengan rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja yaitu 48.38 %.

5. Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Serang tahun 2010-2016 sebagai berikut:

Tahun 2010 = $\frac{991,762,757,790.00}{1,049,319,218,903.00}$ x 100% = 94.51%

Tahun 2011 = $\frac{1,173,739,190,170.00}{1,383,704,261,796.00}$ x 100% = 84.83%

Tahun 2012 = $\frac{1,413,896,049,316.00}{1,703,996,308,977.00}$ x 100% = 82.98%

Tahun 2013 = $\frac{1,706,378,016,007.00}{2,057,457,400,152.00}$ x 100% = 82.94%

Tahun 2014 = $\frac{1,909,367,171,714.00}{2,372,031,842,368.00}$ x100%= 80.50%

Tahun 2015 = $\frac{2,342,220,890,626.00}{2,793,598,869,074.00}$ x 100% = 83.84%

Tahun 2016 = $\frac{2,543,616,888,641.00}{2,896,923,208,360.00}$ x 100% = 87.80%

Tabel 4. 6.

Rasio Efesiensi Belanja Kabupaten Serang Tahun 2010-2016

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Angaran Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi Belanja (%)
2010	991,762,757,790.00	1,049,319,218,903.00	94.51%
2011	1,173,739,190,170.00	1,383,704,261,796.00	84.83%
2012	1,413,896,049,316.00	1,703,996,308,977.00	82.98%
2013	1,706,378,016,007.00	2,057,457,400,152.00	82.94%
2014	1,909,367,171,714.00	2,372,031,842,368.00	80.50%
2015	2,342,220,890,626.00	2,793,598,869,074.00	83.84%
2016	2,543,616,888,641.00	2,896,923,208,360.00	87.80%
Rata-Rata	1,725,854,423,466.29	2,036,718,729,947.14	85.34%

Sumber: Hasil Olahan Data

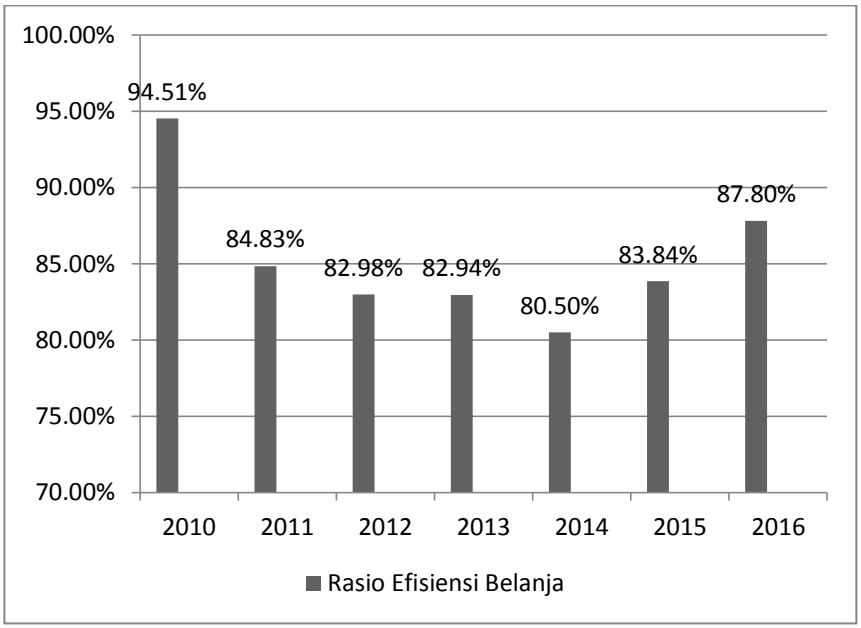

Gambar Grafik 4.6

Efisiensi Belanja Kabupaten Serang Tahun 2010-2016

Persentase tingkat rasio efiensi belanja terkecil terdapat pada tahun 2014 yaitu 80.50 % sedangkan persentase tingkat rasio efiensi belanja terbesar terdapat pada tahun 2010 yaitu 94.51 %. Persentase tingkat rasio efiensi belanja sempat mengalami penurunan dari tahun 2011-2014 namun kembali meningkat drastis di tahun 2016. Apabila dilihat dari tahun 2010-2016, dengan rata-rata rasio efiensi belanja yaitu 85.34 %.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Data yang dikumpulkan berupa arsip dokumen pada bagian BPKAD yang berupa data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010-2016.

1. Derajat Desentralisasi

Pemerintah daerah kabupaten Serang termasuk belum mampu menyelenggarakan desentralisasi karena nilai rata-rata yang masih dalam kategori sangat rendah (skala 0%-25%). Artinya pemerintah daerah kabupaten Serang belum mampu menyelenggrakan desentralisasi dengan mengoptimalkan potensi daerah untuk menyelenggarakan pelayanan umum yang lebih baik sebab rata-rata rasio derajat desentralisasi hanya mencapai 7.87%.

2. Rasio Ketergantungan

Pemerintah daerah kabupaten Serang memiliki tingkat ketergantungan dalam kategori sedang (skala >50%-75%). Hal ini disebabkan masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah dibandingkan pendapatan transfer. Artinya kabupaten Serang masih bergantung kepada pemerintah pusat dengan rata-rata rasio ketergantungan sebesar 60.15%.

3. Rasio Kemandirian

Dari hasil perhitungan tingkat kemandirian. kabupaten Serang masih dalam kategori kurang dengan pola hubungan Instruktif untuk tahun 2010-2015 (skala 0%-25%) dan pola hubungan konsultatif untuk tahun 2016 (skala 25%-50%), yang berarti kabupaten Serang belum mandiri sebab peranan pemerintah pusat masih lebih dominan. sehingga kabupaten Serang tidak dapat melaksanakan otonomi daerah secara finansial dan pemerintah kabupaten Serang belum cukup mampu untuk

membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

4. Rasio Keserasian

   a. Rasio Belanja Operasi

      Artinya porsi belanja operasi pada pemerintah daerah kabupaten Serang masih cukup tinggi dengan rata-rata 56.88%. Hal ini disebabkan oleh besarnya belanja pegawai karena penambahan jumlah pegawai negeri sipil.

   b. Rasio Belanja Modal

      Porsi belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten Serang cukup rendah pada tahun 2010-2015 namun mengalami peningkatan di tahun 2016 dengan rata-rata 48.38%. Pemerintah juga memiliki upaya untuk terus mengupayakan pembangunan.

5. Rasio Efisiensi Belanja

Pemerintah daerah kabupaten Serang sempat mengalami tingkat efisiensi belanja yang kurang efisien pada tahun 2010 (skala 90%-100%), kemudian mengganti status menjadi cukup efisien dari tahun 2011-2016 (skala 80%-90%) artinya tingkat efisiensi belanja semakin baik. Hal itu terjadi karena realisasi pendapatannya lebih besar daripada realisasi belanja daerah. Sehingga total belanja melebihi total pendapatan daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Anis karlina dan Nurhandayani dengan hasil analisis menunjukkan yang bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah kota surabaya secara umum dikatakan kurang baik dalam varians pendapatan. Hal ini dibuktikan (a) varians pendapatan daerah rata-rata di bawah 100%, (b) rasio keuangan daerah dilihat derajat desentralisasi menunjukkan ratarata 53,54%, rasio kemanirian keuangan

daerah rata-rata 176,05%, rasio pertumbuhan pendapatan daerah rata-rata positif, 2) kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan angaran belanja daerah Kota Surabaya secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan (a) varians belanja daerah rata-rata di bawah 100%, (b) keserasian belanja daerah dilihat dari rata-rata belanja modal 24,98% dan rata-rata belanja operasional 74,98%, (c) efesiensi belanja daerah rata-rata dibawah 100% yakni 82,54%, (b) pertumbuhan belanja daerah mengalami pertumbuhan rata-rata 11,00%, (c) keserasian belanja daerah dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi rata-rata 90,33% dibandingkan dengan belanja modal rata-rata 9,57%, (d) efisiensi belanja daerah menunjukkan rata-rata di bawah 100%.

D. Perspektif Islam

Kinerja adalah segala sesuatu yang dicapai seseorang maupun kelompok organisasi. Islam memandang kinerja dalam Islam adalah bagian dari ibadah dan jihad jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya dan tidak melupakannya. Dalam pandangan Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang di ajarkan al-Qur'an yaitu:

1. Keadilan

   Keadilan dalam penelitian ini ditujukan kepada pemerintah kabupaten Serang dalam pembagian dana atau anggaran yang dimiliki untuk daerah-daerahnya secara adil.

2. Kejujuran

   Kejujuran dalam penelitian ini ditujukan untuk orang-orang yang mengelola keuangan di kabupaten Serang. Jika orang-orang yang mengelola keuangan di kabupaten Serang sudah jujur maka akan menambah pendapatan lebih banyak karena tidak ada yang berbuat

curang seperti korupsi maka kabupaten Serang akan semakin baik.

3. Usaha

Usaha dalam penelitian ini adalah usaha untuk mengembangkan pendapatan daerah di kabupaten Serang dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada seperti pajak dan retribusi daerah agar bisa membiayai daerahnya sendiri dan tidak ketergantungan dengan bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi serta dapat meningkatan kinerja keuangan kabupaten Serang.

4. Inisiatif

inisiatif dalam penelitian ini ditujukan kepada masyarakatnya karena masyarakat juga sangat berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian di kabupaten Serang seperti melalui pembayaran pajak. Masih banyak masyarakat sebagai wajib pajak yang belum sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Jika masyarakat sadar dan ikut berpartisipasi dalam membayar pajak

daerah maka akan meningkatkan perekonomian kabupaten Serang.

5. Kreativitas

Kreativitas dalam penelitian ini adalah kemampuan untuk menciptakan ide dan gagasan di kabupaten Serang seperti masih tingginya tingkat ketergantungan kabupaten Serang pada pemerintah pusat, Pemerintah kabupaten Serang dalam menjalankan kewenangan atau tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat masih kurang baik, dan permasalahan-permasalahan lainnya

Kinerja keuangan pemerintah kabupaten Serang tahun 2010-2016 telah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yaitu keadilan, kejujuran, usaha, inisiatif dan kreativitas namun belum maksimal (masih kurang baik) bila dilihat dari hasil perhitungan kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio keserasian dan rasio efisiensi belanja.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah:

Kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten Serang tahun 2010-2016 berdasarkan rasio derajat desentralisasi masuk katagori sangat rendah. Itu artinya pemerintah daerah kabupaten Serang belum baik dalam menyelenggarakan pelayanan umum. Kemudian berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah, mengalami tingkat ketergantungan di katagori sedang dari pemerintah pusat dalam pemberian dana transfer. Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah, mengalami tingkat kemandirian yang sangat kurang. Sebab peranan pemerintah lebih dominan, sehingga pemerintah kabupaten Serang belum mampu membiayai kebutuhan dan kegiatan daerahnya sendiri. Kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten

Kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten erang tahun 2010-2016 berdasarkan rasio keserasian yaitu rasio belanja operasi keuangan daerah, mengalami porsi belanja operasi yang cukup tinggi disebabkan oleh besarnya belanja pegawai karena penambahan jumlah pegawai negeri sipil. Untuk rasio belanja modal keuangan daerah, porsi belanja operasi pada pemerintah daerah cukup kecil dan dapat dikatakan pemerintah daerah kabupaten Serang masih kurang memperhatikan pembangunan-pembangunan di daerah.

Kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten Serang tahun 2010-2016 berdasarkan rasio keserasian yaitu rasio belanja modal keuangan daerah, mengalami penurunan dan posri belanja modal yang cukup kecil. Kinerja keuangan daerah pemerintah daerah kabupaten Serang tahun 2010-2016 berdasarkan rasio efisiensi belanja keuangan daerah, mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal itu terjadi karena realisasi pendapatannya lebih besar daripada realisasi belanja daerah. Sehingga nilai efsiensi yang besar membuat

pemerintah daerah kabupaten Serang belum bisa memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka butir-butir saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah diharapkan lebih meningkatkan porsi belanjanya untuk belanja modal yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi Kabupaten Serang,
2. Bagi praktisi lembaga keuangan diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah nya dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah pendapata asli daerah, sehingga ketergantungan pendapatan dari pemerintah pusat bisa semakin berkurang
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan dan memperpanjang periode waktu penelitian serta dapat menggunakan lebih banyak lagi rasio yang mungkin dapat

mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Serang. Sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih akurat dan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Adisasmita, Rahardjo. *Manajemen Pemerintah Edisi Pertama.* Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2011.

Chee, Daud Vicary Abdulah dan Keon. *Buku Pintar Keuangan Syariah* . Jakarta: Zaman, 2012.

Halim, Abdul. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007.

Halim, Abdul. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah Edisi Pertama.* Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 2001.

Hanafi, Abdul Halim. *Metode Penelitian Bahasa Untuk Penelitian Tesis dan Disertasi.* Jakarta: Diadit Media, 2011.

Heykal, Nurul Huda dan Muhamad. *Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Teoritis Praktis.* Jakarta: Kencana, 2010.

Iqbal, Abdul Halim dan Muhamad. *Pengelolaan Keuangan Daerah.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012.

Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, n.d.

Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: ANDI, 2002.

Mursyidi. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia.* Bandung: Refika Aditama, 2009.

Pramono Hariadi, dkk. *Pengelolaan Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat, 2010.

Renyowijoyo, Muindro. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba Edisi 3.* Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.

Rosidin, Utang. *Otonomi Daeah dan Desentralisasi dilengkapi Undang-undnag Nomor 32 Tahun 2004 dengan Perubahan-perubahannya.* Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Santoso, Lukman. *Hukum Pemerintahan Daerah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Saragih, Juli Panglima. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.* Pejaten Barat: Ghalia Indonesia, 2003.

Sopiah, Etta Mamang Sangadji dan. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian.* Yogyakarta: ANDI, 2010.

Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Syamsi, Ibnu. *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara Edisi Revisi* . Jakarta: RINEKA CIPTA, 1994.

Widjaja, HAW. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.* Yogyakarta: ANDI, 2011.

Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

JURNAL :

Armaja, dkk. "Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan." *Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 3, No. 2*, 2015: 171.

Azis, Asmaul. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *EKSIS, Vol. XI, No. 1*, 2016: 90.

Handayani, Anis Karlina dan Nur. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Apbd Kota Surabaya Tahun 2012-2015." *Ilmu Dan Riset Akuntansi, Vol. 6, No. 3*, 2017: 913.

Harimurti, Dewi SPA dan Fajar. "Pengaruh Pengawasan Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar." *Eksplorasi, Volume XXIX, No.2*, 2017: 16.

Marina F. Pandjaitan, dkk. "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2011-2016." *Jurnal Emba, Vol.6 No.3*, 2018: 1399.

Susilowati, dkk. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2013-2015." *Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Vol. 12, No. 2*, 2016: 232.

AL-QUR'AN:

Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*.Bandung: Antapani. 2007.

LAMPIRAN-LAMPIRAN